

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Setiap organisasi memiliki beberapa pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda dalam mewujudkan tujuan organisasi tersebut. Jadi, organisasi tersebut di tuntut untuk cepat tanggap dan peka terhadap perubahan sosial yang terjadi, dari aspek lingkungan, teknologi maupun ilmu pengetahuan yang terus menerus berkembang. Organisasi dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai tujuannya. Berjalannya sebuah organisasi dipengaruhi oleh kinerja sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada didalamnya. Tapi sebelum masuk kedalam kinerja sumber daya manusia yang ada didalam organisasi, struktur organisasi menjadi langkah awal dalam melakukan kinerja dan menjadi faktor penting dalam memengaruhi perilaku individu-individu dan kelompok-kelompok yang ada didalam organisasi. Dengan adanya struktur organisasi, para pemimpin organisasi dapat menentukan tugas fungsi dan pokok sesuai dengan jabatan yang telah diberikan serta dapat menentukan harapan-harapan dan ide-ide mengenai apa yang akan dilakukan anggotanya dalam mencapai tujuan organisasi.<sup>1</sup> Namun sebelum tujuan organisasi tercapai, sumber daya manusia yang ada didalam organisasi tersebut harus melakukan pekerjaan tertentu. Tidak hanya melakukan pekerjaan saja, mereka juga dituntut untuk melakukan pekerjaan dengan cepat dan tepat.

---

<sup>1</sup> John M. Ivancevich, Robert Konopaske, Michael T. Mattenson, 2006, Perilaku dan Manajemen Organisasi, Jakarta: Penerbit Erlangga, HLM 235

Oleh sebab itu, keberhasilan suatu organisasi tidak lepas dari kinerja sumber daya manusia yang ada didalam organisasi tersebut.

Tujuan dan keberhasilan suatu organisasi dapat dicapai apabila kinerja sumber daya manusianya memumpuni dan dapat menguasai tugas yang diberikan. Maka setiap organisasi harus memiliki pegawai yang kinerjanya berkualitas supaya target bisa tercapai. Dan itu tidaklah mudah, karena banyak sekali faktor yang harus diberikan oleh pegawai kepada organisasi tersebut. Kinerja pegawai dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari faktor tenaga kerja itu sendiri maupun dari faktor lingkungan dari organisasi tersebut. Apabila ada seseorang yang telah bergabung di dalam suatu organisasi, maka dia harus mempunyai komitmen dalam dirinya yakni adanya keterlibatan kerja dalam organisasi tersebut. Keterlibatan kerja merupakan sebuah tolak ukur kemampuan seseorang untuk menyatukan dirinya dalam pekerjaan tersebut, menginvestasikan waktu, kemampuan, pikiran dan energinya untuk pekerjaan dan menganggap pekerjaan sebagai bagian penting dalam kehidupannya.

Bentuk sebuah organisasi bisa berupa lembaga yang terbentuk didalam masyarakat. Pembentukan kelembagaan didalam masyarakat cenderung masih terikat oleh peranan individu dan kelompok. Sehingga lembaga-lembaga yang sudah terbentuk di dalam masyarakat ada yang bersifat orisinal (informal) yang terlahir dari adat istiadat atau kebiasaan yang turun termurun dan ada juga yang terbentuk dari internal maupun eksternal masyarakat itu sendiri (formal). Kelembagaan yang terbentuk baik formal maupun informal dimasyarakat mempunyai peranan yang penting sekali dalam pembangunan di masyarakat.

Kedua lembaga ini akan selalu berpengaruh dalam pembangunan sosial ekonomi di masyarakat dan juga dapat menjadi sebuah solusi dalam memperbaiki dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan masyarakat yang berpengaruh di sosial ekonomi masyarakat merupakan syarat pokok dalam proses pembangunan.

Dalam suatu kelembagaan akan memunculkan sebuah konsep modal sosial di dalam lembaga tersebut untuk pembangunan sosial ekonomi di masyarakat. Munculnya konsep modal sosial dalam kelembagaan merupakan respon dari para ahli terhadap permasalahan yang ada di masyarakat terutama soal kurangnya hubungan sosial yang ada di masyarakat. Karena kurangnya hubungan sosial tersebut, maka terjadi kerenggangan didalam kelembagaan tersebut. Kerenggangan tersebut akan menyebabkan ketimpangan sosial yang akan mengganggu jalannya pembangunan. Oleh karena itu, dalam upaya membangun sebuah bangsa yang kompetitif, inovatif dan kreatif, peranan modal sosial menjadi sangat penting sekali.

Modal sosial merupakan modal awal yang dimiliki individu dari hasil interaksi sosial dan komunikasi. Didalam modal sosial, ada unsur jaringan sosial yang telah melekat di dalam modal sosial tersebut. Jaringan sosial merupakan unsur awal dalam pembentukan modal sosial setelah terjalin sebuah interaksi. Setelah jaringan sosial terbentuk dalam individu, maka unsur kedua pun akan muncul. Unsur kepercayaan yang merupakan unsur kedua dalam modal sosial dan

menjadi elemen terpenting dalam modal sosial. Unsur kepercayaan yang dapat menentukan tingkat keberhasilan sebuah modal sosial.<sup>2</sup>

Modal sosial merupakan elemen penting untuk meningkatkan prospek ekonomi masyarakat dan bangsa, termasuk meningkatkan fasilitas-fasilitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan secara berkompeten dan akuntabilitas institusi politik. Karena modal sosial ini, dapat menghasilkan perubahan cara pandang hidup, harapan, struktur dan nilai-nilai sosial ekonomi. Seseorang akan diajarkan untuk menabung dan berani berinvestasi demi mendapatkan sebuah keuntungan. Didalam masyarakat memiliki beberapa kelembagaan di masyarakat, seperti adanya lembaga politik. Lembaga politik berfungsi untuk memenuhi kebutuhan distribusi kekuasaan dan wewenang dalam mengatur urusan-urusan masyarakat.<sup>3</sup> Jenis lembaga ini antara lain pemerintahan pusat, daerah maupun desa. Setiap pemerintah didalam suatu negara memiliki tugas untuk menjaga keamanan negara dan mensejahterakan seluruh warga negaranya.

Sama halnya di Negara Indonesia yang mempunyai wilayah yang sangat luas dan membuat Pemerintah Negara Indonesia mengambil sebuah keputusan supaya dapat meratakan kesejahteraan di Indonesia. Terbentuklah sebuah Pemerintahan Daerah yang dapat membuat kinerja pemerintahan pusat lebih efektif dan efisien. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, "Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

---

<sup>2</sup> Zubaedi, 2013, Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik, Jakarta: Kencana, HLM 163

<sup>3</sup> Ibid, HLM 167

dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.”<sup>4</sup> Maksud dari Undang-Undang tersebut adalah bahwa daerah diberi hak dan wewenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri dalam rangka mengembangkan daerah tersebut. Hal tersebut dilakukan Pemerintah Pusat untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat. Bagaimanapun caranya, Pemerintahan Daerah dituntut untuk mempunyai ide yang kreatif dan inovatif dalam mengembangkan daerahnya. Hal itu dilakukan untuk menggali sumber daya alam maupun manusia yang ada didalam daerah tersebut supaya di gunakan semaksimal mungkin untuk menjadi daerah yang mandiri.

Pemerintah Daerah memiliki peranan penting dalam kesejahteraan masyarakat. Sudah dijelaskan diatas bahwasannya modal sosial menjadi elemen yang sangat penting dalam sebuah Pemerintahan, termasuk juga Pemerintahan Daerah. Dengan terbangunnya jaringan sosial, maka hubungan yang terjadi antar lembaga yang terlibat didalamnya dapat ditingkatkan. Hal tersebut terjadi karena mereka belajar dari pengalaman, meningkatkan komunikasi, memaksimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki setiap daerah, melakukan evaluasi bersama, menyediakan mekanisme kerja bersama, dan menilai struktur kelembagaan masing- masing lembaga yang terlibat untuk memastikan bahwa

---

<sup>4</sup> Sunarno Siswanto, 2006, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, HLM 5

antar individu yang terlibat mempunyai visi dan misi yang sama tentang isu yang diperjuangkan.<sup>5</sup>

Hal tersebut merupakan dampak dalam penerapan modal sosial didalam suatu lembaga khususnya di Pemerintahan Daerah. Apalagi, sekarang ini era revolusi industri 4.0, yang lebih mementingkan kreatifitas dan inovatif dalam hal digitalisasi. Relasi Pemerintah dengan lembaga lain maupun swasta dapat membantu mengembangkan industri 4.0 didalam daerah tersebut. Maka munculah sebuah *stakeholder* yang di anggap sebagai perpanjangan Pemerintah, terutama Pemerintah Daerah. Hubungan antara Pemerintah dengan lembaga lain tidak lagi saling bergantung, tapi saling melengkapi dan membantu, saling mendukung, dan tidak ada kedudukan yang tinggi maupun rendah, tapi diutamakan saling bekerja sama satu sama lain. Pemerintah Daerah harus membangun relasi dimulai dari antar individu yang ada didalamnya sampai pada antar lembaga lainnya maupun swasta.

Hal ini sama dengan Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan yang letaknya lebih dekat dengan masyarakat. Untuk mengimbangi Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan harus lebih aktif, kreatif dan inovatif. Kecamatan Puri merupakan salah satu wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto di Tingkat Kecamatan yang aktif dan inovatif dalam menjalankan program dan tugas-tugasnya. Sumber daya manusia di Kantor Kecamatan Puri harus bisa memberikan pelayanan yang tebaik untuk masyarakat dan mengembangkan

---

<sup>5</sup> Agus Pramusinto dan Erwan Agus Purwanto, 2009, Reformasi Birkasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik, Yogyakarta: Gava Media, HLM 347

organisasinya tersebut melalui ide-ide yang kreatif dan inovatif. Mereka harus membangun sebuah kerja sama dan rasa saling percaya antar pegawai supaya tujuan tersebut telaksana secara maksimal.

Mutu sumber daya manusia di Kantor Kecamatan Puri harus sangat diperhatikan untuk kemajuan organisasi pemerintah tersebut. Terciptanya sebuah modal sosial sangatlah bergantung pada mutu sumber daya manusia di Kantor Kecamatan Puri tersebut. Sumber daya manusia memiliki fungsi untuk faktor pembangunan maupun sebagai tujuan untuk pembangunan itu sendiri. Manajemen sumber daya manusia sangat ditentukan oleh sifat-sifat sumber daya manusia itu sendiri yang selalu berkembang baik jumlah maupun mutunya.<sup>6</sup>

Mutu sumber daya manusia menjadi faktor yang sangat penting dalam Negara Berkembang termasuk Indonesia dalam mengejar ketertinggalannya. Apabila sumber daya manusia maju, maka Negara tersebut bisa menjadi Negara yang dapat menyeimbangi Negara maju. Oleh karena itu, modal sosial sangat berperan sebagai unsur perekat pegawai di Kantor Kecamatan Puri dalam melaksanakan visi dan misi organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam mencapai tujuan organisasi di butuhkan pegawai yang patuh, jujur, mampu bertanggung jawab, cepat dalam melakukan pekerjaan, etika yang baik terhadap orang lain, dan baik terhadap pegawai lainnya maupun kepada masyarakat.

Dalam hal ini, semakin meningkatnya kinerja pegawai yang sesuai dengan harapan, maka semakin terbentuknya rasa kerja sama untuk meningkatkan

---

<sup>6</sup> Basir Barthos, 2001, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT Bumi Aksara, HLM 3

organisasi tersebut. Karena itu, setiap organisasi terutama Kantor Kecamatan Puri seharusnya memiliki motivasi untuk membangun dirinya sendiri sebagai organisasi yang sedang belajar, maksudnya disini, bahwa mereka masih ingin berkembang terus menerus baik dari sisi individunya, kelompoknya maupun organisasinya, dan tidak pernah puas dalam pencapaiannya. Sifat selalu berkeinginan untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya merupakan sumber daya manusia yang unggul.

Sebuah organisasi harus bisa mengelola dan melaksanakan berbagai dan rangkaian kegiatan atau proses yang diarahkan menuju tercapainya tujuan organisasi. Penyelenggaraan rangkaian kegiatan dalam organisasi dilakukan oleh manusia atau pegawai pelaksana rangkaian tugas atau kegiatan tersebut, maka dengan sendirinya kinerja organisasi yang bersangkutan banyak tergantung pada perilaku pegawai yang terdapat dalam organisasi tersebut. Serangkaian tugas yang dilakukan oleh para pegawai bisa disebut dengan tugas pokok dan fungsi para pegawai khususnya Pegawai Pemerintah Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto. Kinerja pegawai Pemerintah Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto di tuangkan ke dalam tugas pokok dan fungsi agar organisasi tersebut memiliki tujuan. Tupoksi atau tugas pokok dan fungsi tersebut harus dijalankan semaksimal mungkin dan sesuai aturan supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ketika pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilakukan, maka kualitas pegawai harus ditingkatkan, modal sosialpun menjadi salah satu solusi dalam penerapannya agar kinerja pegawai dapat maksimal.



Pada awalnya, individu memegang haknya masing-masing, tapi lama kelamaan tidak dapat secara terus menerus memegang haknya sendiri-sendiri. Mereka akan membutuhkan orang lain dalam memenuhi hak-hak hidupnya.<sup>7</sup> Oleh karena itu, modal sosial sangat penting untuk menunjang pengembangan kinerja pegawai dalam kehidupan berorganisasi terutama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi atau tupoksi. Melalui penelitian ini, peneliti memfokuskan diri pada hubungan modal sosial terhadap pengembangan kinerja pegawai yang di satukan dengan judul “ Pengaruh Modal Sosial Terhadap Peningkatan Kinerja Internal Pegawai Pemerintah di Kantor Kecamatan Puri”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah di paparkan, maka peneliti dapat mengambil rumusan masalah adakah pengaruh modal sosial terhadap peningkatan kinerja internal pegawai Pemerintah di Kantor Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah mengkaji, meneliti, dan menggali terkait pengaruh modal sosial terhadap peningkatan kinerja internal pegawai Pemerintah di Kantor Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto.

---

<sup>7</sup> Sindung Haryanto, 2016, Spektrum Teori Sosial Dari Klasik Hingga Postmodern, Jogjakarta: Ar Ruzz Media, HLM 204

## **1.4 Manfaat Penelitian.**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yaitu:

### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Pertama, Memberikan sumbangsih dengan menambah khasanah ilmu pengetahuan sosial khususnya yang mengarah pada kajian ilmu pemerintahan. Kedua, penelitian ini diharapkan dapat digunakan pada referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Memberikan wawasan bagi peneliti serta para pembaca mengenai pengaruh modal sosial terhadap peningkatan kinerja pegawai Pemerintah. Adapun temuan penelitian ini diharapkan dapat memberi inspirasi bagi calon peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian dibidang Pemerintahan bagian sosial ekonomi dan kewarganegaraan.

## **1.5 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka peneliti memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan “Modal Sosial Terhadap Peningkatan Kinerja Internal Pegawai Pemerintah di Kantor Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto”. Kinerja pegawai dipilih karena peningkatan kinerja pegawai akan membawa kemajuan bagi pemerintah.